

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Judul Perancangan

#### **PERANCANGAN RUMAH TAHANAN NEGARA YANG HUMANIS DENGAN KONSEP *URBAN ECOLOGY* DI SURAKARTA.**

Rumah Tahanan : tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia (wikipedia).

Arsitektur Humanis : pendekatan arsitektur yang menekankan nilai manusiawi dan rasional dicapai dengan adanya kenyamanan psikologis dan visual dari bangunan.

*Urban Ecology* : merupakan studi ilmiah tentang hubungan organisme hidup satu sama lain dan lingkungannya dalam konteks lingkungan perkotaan.

Perancangan bangunan yang difungsikan sebagai rumah tahanan dan narapidana. Melakukan perancangan bangunan dengan fokus terhadap kebutuhan ruang hunian, sirkulasi bangunan, infrastruktur bangunan dan elemen-elemen keamanan penjara agar mampu mewadahi berbagai kegiatan yang kompleks tetapi juga tidak menghilangkan konsep pemasyarakatan.

### 1.2 Premis Perancangan

Sedikit alasan untuk percaya bahwa hukuman penjara akan dihapuskan di masa yang akan datang. Perubahan sistem penjara menjadi lembaga pemasyarakatan merupakan bukti bahwa hukuman lambat laun akan berubah. Populasi manusia makin meningkat dan ada semacam pernyataan untuk mengurangi "antrian penjara". Penjara tua ditutup dan penjara kecil dan pengamanan minim dihapus dan tidak difungsikan. Maka dari itu timbul pertanyaan seperti apa penjara atau lembaga pemasyarakatan yang akan dipertimbangkan di masa yang akan datang. Tentang gagasan dan rancangan bangunan lembaga pemasyarakatan dengan sistem dan kebutuhan sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang relevan saat ini.

Lokasi perancangan terletak di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta yang merupakan bangunan peninggalan kolonial belanda yang dibangun pada tahun

1878. Pada masa itu abad ke-18 bahwa filsuf dan ahli hukum mulai menulis membela praktek kemanusiaan pada penjara. Para reformis terpenting dari gerakan ini adalah: Jeremy Bentham, Cesare Beccaria, dan John Howard. Setiap orang membela berbagai jenis isolasi dan tenaga kerja di dalam penjara, apakah seorang tahanan harus berbicara di antara mereka atau tidak. Tapi ketika subjek desain penjara ide pertama datang dari Jeremy Bentham: Panopticon. Panopticon adalah sistem surveilans yang didasarkan pada menara pusat dengan semua sel di sekitarnya. Semua tahanan harus merasa diawasi bahkan jika penjaga dalam menara pengawas tidak mencari mereka. Desain penjara itu digunakan dalam beberapa lembaga (di rumah sakit, sekolah, dan asylums) tetapi karena titik pusat juga titik rapuh di dalam penjara ada kritik di sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa konsep penjara lama masih melekat pada rancangan desain Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Maka dari itu perlu adanya kajian dan perancangan untuk menyesuaikan kebutuhan dan konsep pemasyarakatan.

Di satu sisi rumah tahanan sebagai institusi koreksional mempunyai peran penting dalam memperbaiki tatanan hidup seorang manusia yang melakukan kejahatan atau kesalahan. Konsep pembinaan diterapkan pada setiap narapidana dan tahanan yang ada di rumah tahanan. Rumah tahanan yang akan datang menekankan prinsip normalitas yang berdasarkan hak narapidana dan tahanan. Hal tersebut dapat diimplementasikan pada hunian maupun fasilitas pelayanan dan pembinaan. Fasilitas pelayanan dan pembinaan meliputi perawatan medis, perpustakaan, sekolah, tempat ibadah, workshop dan lainya.

Disisi lain sulit untuk menemukan refleksi tentang bagaimana sebuah penjara harus dibangun untuk memenuhi persyaratan mengenai rehabilitasi dan kondisi yang memuaskan bagi narapidana. Tampak sulit untuk menggabungkan penekanan realisasi keamanan dan pelayanan serta pembinaan. Hal tersebut terjadi pada penjara di Indonesia. Resikonya adalah bahwa pandangan penjara akan semakin membenarkan arsitektur penjara kurang untuk menjunjung tinggi normalitas dan kemanusiaan.

Humanis dan *urban ecology* menjadi parameter perancangan rumah tahanan. Aspek humanis diambil dari kebutuhan mendasar manusia. Dimulai dari hirarki terbawah yaitu bertahan hidup, keamanan, sosial, pengakuan, dan aktualisasi diri. Hal yang paling membuat efek jera penjara masih terasa adalah keterbatasan kebutuhan sosial. *Urban Ecology* merupakan perancangan dengan pendekatan ekologi dalam

konteks perkotaan. Pencatatan suhu udara lingkungan dan pengelolaan limbah air merupakan evaluasi bangunan yang sudah ada di lokasi perancangan.

Maka timbul beberapa pertanyaan. Bagaimana merancang rumah tahanan yang menjunjung tinggi aspek normalitas akan tetapi tetap berdampak efek jera pada penghuninya. Bagaimana ruang untuk hunian, workshop, beribadah, sekolah, dan pelayanan medis dimasukkan dalam penjara baru, ketika mereka harus bersaing dengan argumen keamanan dan efisiensi biaya operasional penjara? Apa dampak yang akan ditimbulkan pada lingkungan dan hubungan-antara narapidana dan petugas penjara dan antara narapidana sendiri?

### **1.3 Latar Belakang**

#### **1.3.1 Keadaan Kriminalitas di Indonesia**

Kejahatan atau tindakan kriminal adalah suatu bentuk tindakan menyimpang yang melekat pada aspek sosial masyarakat. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindakan kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartono, 1999: 122). Setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dilakukan proses pidana sampai pada akhirnya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Permasyarakatan yang lebih dikenal di masyarakat yaitu penjara.

Pembentukan penjara sebagai institusi yang membentuk karakter menjadi lebih baik serta jera dipengaruhi oleh faktor fisik dan faktor psikologis. Dalam hal ini, faktor fisik yang mendukung pembentukan karakter yakni dari segi arsitektural. Sedangkan faktor non fisik merupakan segala aspek yang terkait dengan sistem dan keseharian penghuni penjara sehingga berpengaruh kepada mental narapidana. Kedua hal tersebut memiliki sisi positif dan negatif terkait dengan fungsi penjara sebagai tempat rehabilitasi. Hasil dari rehabilitasi diharapkan dapat terbentuknya karakter yang baik bagi narapidana yang telah habis masa hukumannya. Apabila aspek negatif yang ada pada suatu penjara lebih banyak daripada aspek positifnya, maka penjara tersebut belum dapat dikatakan berhasil menjadi suatu institusi pengkoreksi.

### 1.3.2 Sejarah Bangunan Penjara dan Penghukumannya

Jeremy Betham pada tahun 1785 merancang konsep panoptikon yang diaplikasikan di penjara Indonesia. Konsep desain penjara itu memungkinkan seorang pengawas untuk mengawasi semua tahanan, tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati konsep tersebut membentuk pola dasar penataan ruang penjara. Akan tetapi konsep ini sering bersebrangan atau berbenturan dengan konsep pembinaan. Konsep pembinaan bertujuan agar warga binaanya bebas mengembangkan kualitas dirinya sedangkan konsep pengamanan menginginkan warga binaanya dibatasi ruang gerak dan aktivitasnya agar terhindar dari niatan menginginkan warga binaannya dibatasi ruang gerak dan aktivitasnya agar terhindar dari niatan melarikan diri, kerusuhan, permufakatan jahat, dan tindakan menyimpang lainnya.

Marcus Vitruvius Pollio menyatakan bahwa dalam mendesain perlu dipikirkan tujuan dari keberadaan benda tersebut kemudian secara garis besar desain dibagi menjadi tiga yaitu bangunan publik, semi-publik, dan privat yang mana masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. Dikombinasikan dengan Erving Goffman yang menciptakan istilah *Total Institution*, dimana tiap institusi memiliki sesuatu yang meliputi minat dari anggotanya dan memberikan suatu layanan pada dunia mereka. Tiap institusi memiliki "dunianya" sendiri (Burns, 1992). Karakteristik mereka disimbolkan dalam batas-batas hubungan sosial dimana untuk tampilan luarnya berciri seperti : pintu yang terkunci, dinding yang tinggi, kawat berduri, keterbukaan, warna dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan ranah kriminologi, maka peneliti mulai dari desain bangunan dalam bidang penegak hukum.

Konsep pemasyarakatan dianggap sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan kolonial yang diberlakukan sebelum ini. Melihat hal tersebut timbul pertanyaan dalam beberapa literatur menggambarkan sistem perlakuan terhadap narapidana dan tahanan yang dinilai lebih manusiawi. Lapas dan rutan menjadi salah satu bagian dari sistem pemasyarakatan yang hakikatnya membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat kembali ke masyarakat dan dapat hidup secara wajar seperti warga negara lainnya.

### 1.3.3 Populasi Penghuni Rumah Tahanan dan Lapas di Indonesia

Permasalahan yang timbul dan muncul di dalam Lapas atau Rutan bukan semata mata hanya karena kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan di lapangan. Kekeliruan perancangan secara keruangan juga memiliki andil dalam permasalahan di dalam rutan. Overkapasitas menjadi permasalahan yang timbul hampir di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh jumlah penghuni yang terus bertambah. Kondisi kepadatan dan kelebihan kapasitas hunian tersebut apakah dapat diselesaikan dengan menambah kapasitas hunian dengan cara membangun Lapas/rutan baru setiap tahunnya, data jumlah tahanan dan narapidana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana pada Rutan dan Lapas Nasional Tahun 2013-2019**

No	Tahun	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total Penghuni	Kapasitas Hunian Rutan dan Lapas	Selisih antara Jumlah Total Penghuni dengan Kapasitas Hunian	Persentase Kelebihan Penghuni
1	2013	51.395	108.668	160.063	111.857	48.206	143%
2	2014	52.935	110.469	163.404	114.921	48.483	142%
3	2015	57.547	119.207	176.754	119.797	56.957	148%
4	2016	65.554	138.997	204.551	119.797	84.754	171%
5	2017	70.739	161.342	232.081	123.481	108.600	188%
6	2018	72.106	183.274	255.380	129.252	126.128	198%
7	2019	66.306	198.409	264.715	129.252	135.463	205%

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, 2019

Dapat dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika dicermati penambahan kapasitas hunian tidak mampu memadai dan menjawab permasalahan tersebut. Bahkan presentasi kelebihan penghuni sudah mencapai angka 205% di tahun 2019.

Selain permasalahan kapasitas, permasalahan lainnya adalah jumlah petugas pengamanan yang ada tidak sebanding dengan jumlah penghuni rutan/lapas. Idealnya perbandingan petugas rutan/lapas adalah 1:5. Namun pada kenyataannya perbandingan petugas rutan/lapas jauh lebih besar yaitu 1:25. Karena perbandingan yang terlampau jauh ini, penjagaan menjadi tidak maksimal dan mengakibatkan banyak tahanan dan narapidana yang melarikan diri dan menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Berikut data kejadian melarikan diri pada tahun 2017 :

**Table 1.2 Kasus Narapidana dan Tahanan yang melarikan diri Sepanjang Tahun 2017**

No	Bulan	Provinsi/ Kanwil	Rutan/ Lapas	Jumlah	Kondisi
1	Januari	Bengkulu	Lapas Kelas IIA Curup	1 orang Narapidana	Kelebihan penghuni : 182%
2		Jawa Tengah	Lapas Kelas IIA Pekalongan	1 orang Narapidana	kelebihan penghuni 171%
3		Jawa Tengah	Lapas Batu, Nusakambangan, Cilacap	2 orang Narapidana	kelebihan penghuni 0%
4		Jawa Tengah	Rutan Kelas II B Purbalingga	1 orang Narapidana	kelebihan penghuni 59%
5	Februari	Papua	Lapas Kelas II B Merauke	1 orang Narapidana	kelebihan penghuni 0%
6		Papua	Lapas Kelas II A Abepura	5 orang Narapidana, 1 orang Tahanan	kelebihan penghuni 90%
7		Aceh	Lapas Kelas II B Langsa	3 orang Narapidana	kelebihan penghuni 322%

8	Maret	Jambi	Lapas Kelas II A Jambi	4 orang Tahanan	kelebihan penghuni 556%
9		Kalimantan Timur	Rutan Kelas II B Tanah Grogot, Kabupaten Paser	4 orang Tahanan	kelebihan penghuni 190%
10		Kepulauan Riau	Lapas Kelas IIA Barelang Batam	1 orang Tahanan	kelebihan penghuni 247%
11		Nusa Tenggara Timur	Rutan Kelas II BMAumere, Sikka	1 orang Narapidana	kelebihan penghuni 0%
12		Sumatera Selatan	Lapas kelas III Banyuasin, Palembang	1 orang Narapidana	kelebihan penghuni 279%
13	April	Sulawesi Selatan	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	3 orang Tahanan	kelebihan penghuni 102%
14		Sumatera Barat	Lapas Kelas II B Pariaman	6 Orang Narapidana	kelebihan penghuni 149%
15		Sumatera	Lapas Tanjung Gusta, Medan	1 orang	kelebihan penghuni 191%
16	Mei	Aceh	Lapas Banda Aceh	1 orang Narapidana	kelebihan penghuni 0%
17		Riau	Rutan Kelas IIB Sialang Bungkok, Pekanbaru	473 orang Narapidana	kelebihan penghuni 106%
18		Sulawesi Selatan	Lapas Kelas I Makassar	3 orang Narapidana	kelebihan penghuni 49%

19		Sumatera Selatan	Lapas Kelas I Pakjo, Palembang	17 orang Narapidana	kelebihan penghuni 197%
20		Riau	Rutan Kelas IIB Sialang Bungkok, Pekanbaru	7 orang Narapidana	kelebihan penghuni 117%
21	Juni	Jawa Timur	Lapas Kelas II A Bojonegoro	1 orang Narapidana	kelebihan penghuni 58%
22		Kepulauan Riau	Lapas Kelas IIA Barelang Batam	1 orang Narapidana	kelebihan penghuni 247%
23		Jambi	Lapas Kelas IIA Jambi	76 orang Narapidana	kelebihan penghuni 434%
24		Aceh	Rutan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil	6 orang Narapidana	kelebihan penghuni 397%
25		Bali	Lapas Kelas II A Kerobokan, Denpasar	4 orang Narapidana	kelebihan penghuni 326%
26		Sumatera Utara	Lapas Tanjung Gusta, Medan	4 orang Narapidana	kelebihan penghuni 202%
27	Juli	Aceh	Lapas Kelas II A Lhokseumawe	1 orang Narapidana	kelebihan penghuni 234%
28	November	Riau	Lapas Pekanbaru	2 orang Narapidana	kelebihan penghuni 103%
29	Desember	Sumatera Utara	Lapas Kelas II A, Binjai	7 orang Narapidana	kelebihan penghuni 240%



30		Jawa	Lapas Kelas II A Pekalongan	7 orang Narapidana	kelebihan penghuni 105%
----	--	------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Sumber : ICJR, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM, 2019

Dari 30 kasus yang terjadi sebanyak 25 lokasi lapas/rutan yang ditempati mengalami kondisi kelebihan kapasitas hunian. Tingginya angka tahanan/napi yang melarikan diri serta beberapa kerusakan yang terjadi di dalam lapas/rutan diakibatkan oleh gesekan yang terjadi antara penghuni. Gesekan terjadi karena perebutan tempat tidur, kamar mandi, makanan, konflik kelompok, eksploitasi, hak kesehatan yang tidak terpenuhi dan banyak hal lain akibat dampak dari kelebihan penghuni.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas penghuni sebagai penyebab utama kasus tersebut. Kelebihan kapasitas menyebabkan kehidupan di dalam rumah tahanan ataupun lapas menjadi kurang layak atau tidak humanis. Istilah Humanisme berkaitan dengan kata Latin humus yang berarti tanah atau bumi. Dari kata ini muncul istilah homo yang berarti manusia (makhluk Tuhan) dan humanis yang lebih menunjukkan sifat membumi dan manusiawi. Humanisme menganggap individu rasional sebagai nilai paling tinggi dan menganggap individu sebagai sumber nilai terakhir (Bagus, 1996:295). Pengertian ini ini membawa dampak yang kuat pada kebebasan manusia sebagai individu.

Menurut Rachmawati (2009; 77) menyebutkan kaitan antara manusia dengan arsitektur meliputi pemenuhan kebutuhan (*needs*), pemenuhan kebutuhan manusia sebagai komunitas (*society*), dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam konteks berkemanusiaan, hal perubahan peran, dan arsitek sebagai pelindung/penjaga alam mampu menciptakan kualitas hidup yang berkesinambungan. Posisi penting manusia juga dikemukakan oleh Krippendorf (2006;3) yang menyebutkan bahwa dasar sebuah desain adalah manusia dalam konteks semantik. Kelima prinsip humanisme arsitektur tersebut yang menjadi acuan perancangan rumah tahanan ini. Prinsip tersebut dihubungkan dengan kenyamanan ruang, psikologi ruang, serta organisasi ruang yang ada di rumah tahanan.

Rumah tahanan ini berada di lokasi perkotaan yang padat hunian. Jalan Slamet Riyadi sebagai jalan arteri utama di Kota Surakarta membuat site dikelingi oleh pemukiman padat penduduk, perkantoran dan perdagangan, Rumah tahanan yang

tipologi bangunanya dikelilingi oleh pagar pembatas dan tembok keliling mengurung diri dari ekosistem yang ada. Sehingga ekosistem yang ada di dalam rutan berbeda dengan pemukiman yang ada diluar rutan. Konsep *urban ecology* diterapkan pada perancangan bangunan. *Urban Ecology* menunjang peningkatan kenyamanan hunian yang ada di perancangan rumah tahanan. Rumah tahanan atau lapas pada umumnya bentuk dan tipologi ruang yang masif. Tantangan desain terdapat pada penggabungan aspek humanis dengan kelayakan dan kenyamanan ruang didukung dengan konsep urban ekologi dalam rancangan.

#### **1.4 Pernyataan Persoalan Perancangan**

##### **1.4.1 Permasalahan Umum**

Rumah Tahanan sebagai institusi koreksi mempunyai peran penting dalam menyembuhkan orang yang terhukum. Peran dan fungsi tersebut yang kurang optimal dan paling sulit diantara fungsi-fungsi yang lainnya.

Bagaimana mendesain bangunan Rumah Tahanan Negara yang humanis dan menerapkan konsep *urban ecology*?

##### **1.4.2 Permasalahan Khusus**

Lingkungan penjara memberikan efek psikologis bagi para penghuninya dan para penghuni mempunyai kesempatan untuk memilih tingkah laku dan persepsi lingkungan, seperti pada teori hubungan arsitektur dengan tingkah laku dan persepsi pengguna, *Environmental Probabilism* (Epro). Rancangan penjara memengaruhi perilaku, sikap dan perasaan penghuninya walaupun berperan sebagai bagian variabel kecil dari variabel lainnya, seperti manajemen penjara, karakter personal dan staf (Fairweather, *Psychological effects of the Prison Environment*, 2000).

Efek psikologis tersebut yang akan di benahi dengan pendekatan arsitektur humanis. Arsitektur humanis mengacu pada hierarki Teori Maslow tentang kebutuhan mendasar manusia. Sedangkan pendekatan arsitektur ekologi mengatasi masalah kesehatan lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh Lembaga Pemasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Pada tahun 2006, hampir 10% di antaranya meninggal dalam lapas/ rutan. Sebagian besar

napi yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara.

1. Bagaimana merancang hunian sesuai dengan standar kenyamanan manusia?
2. Bagaimana menerapkan konsep *urban ecology* pada rancangan bangunan rumah tahanan?
3. Bagaimana hubungan antara arsitektur humanis dan *urban ecology* diterapkan dalam perancangan bangunan?

## 1.5 Tujuan dan Sasaran

### 1.5.1 Tujuan Umum

Menghasilkan desain bangunan Rumah Tahanan Negara yang humanis dengan konsep *urban ecology* di Surakarta.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

1. Merancang hunian sesuai dengan kelas dan standar kapasitas rumah tahanan.
2. Merancang hunian rumah tahanan dengan standar kenyamanan manusia.
3. Menerapkan konsep *urban ecology* pada rancangan bangunan rumah tahanan.
4. Meghubungkan penerapan arsitektur humanis dan *urban ecology* pada perancangan bangunan.

### 1.5.3 Sasaran

1. Mampu merancang hunian sesuai dengan standar kapasitas huni?
2. Mampu merancang hunian dengan standar kenyamanan manusia?
3. Mampu menerapkan konsep *urban ecology* pada rancangan bangunan rumah tahanan.
4. Mampu menerapkan hubungan antara pendekatan arsitektur humanis dan konsep *urban ecology*.

## 1.6 Lingkup Permasalahan

### 1.6.1 Arsitektural

Lingkup pembahasan arsitektural meliputi :

- a. Mengenai Standar Ruang pada perancangan Rukan/Lapas.
- b. Arsitektur Humanis
- c. *Urban Ecology*

### 1.6.2 Non Arsitektural

- a. Pembahasan mengenai keberadaan Lembaga Pemasyarakatan
- b. Pembinaan dan pentahapan Tahanan/ Narapidana

## 1.7 Metode Pemecahan Persoalan Perancangan yang Diajukan

Metode perancangan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah perancangan menurut William Pena, 1989 yang terdiri dari 2 tahap yaitu :

1. Penentuan masalah (*Problem Seeking*)
2. Pemecahan permasalahan desain (*Problem Solving*)

### 1. Penentuan Masalah (*Problem Seeking*)

Tahapan penemuan permasalahan kontekstual dengan site Proyek Akhir Sarjana ini. Terdiri dari proses-proses pada tahapan ini yaitu :

- *Tahap pengumpulan informasi*: pengumpulan data baik literatur maupun survey
- *Pengelolaan Informasi*: pengkategorisasian data-data yang didapat
- *Analisis dan Sintesis*: data diolah untuk menemukan rumusan

## 2. Pemecahan Permasalahan Desain (*Problem Solving*)

Tahapan desain yang terdiri dari proses-proses yang menentukan solusi desain yang didasarkan pada hasil analisis dan sintesis dari data-data yang sudah dikumpulkan baik dari literatur maupun survey lapangan.

Berikut tahapan problem solving :

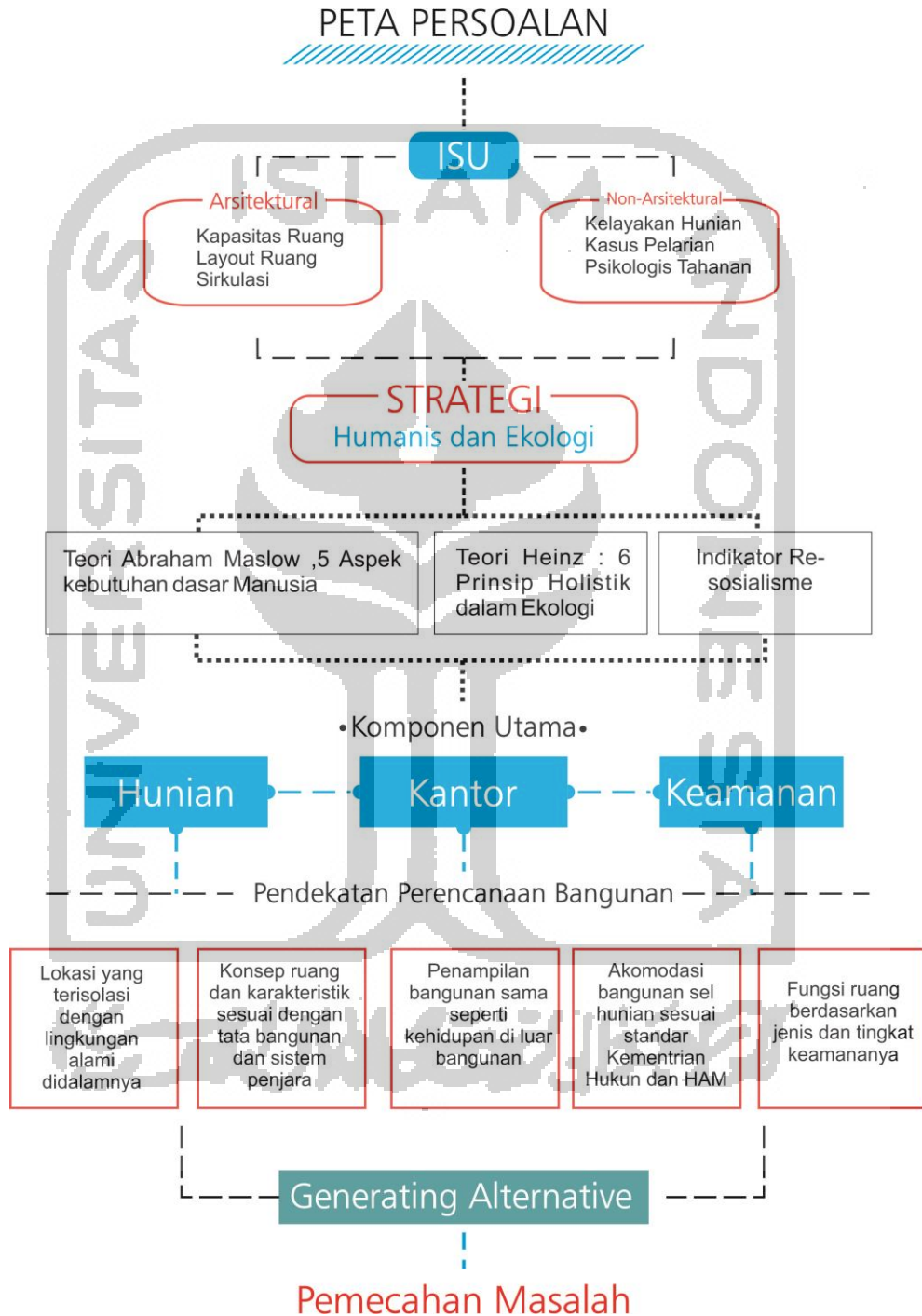
- *Konsep Perancangan*: menentukan solusi desain melalui konsep
- *Pengembangan Rancangan*: elaborasi konsep dalam desain
- *Tahap Pengujian Desain*: pengujian desain untuk menentukan berhasil tidaknya

Berdasarkan latar belakang permasalahan dilakukan analisis terhadap isu-isu yang menjadi dasar perancangan, metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan desain humanis dan konsep *urban ecology*.



## 1.8 Peta Pemecahan Persoalan (Kerangka Berfikir)

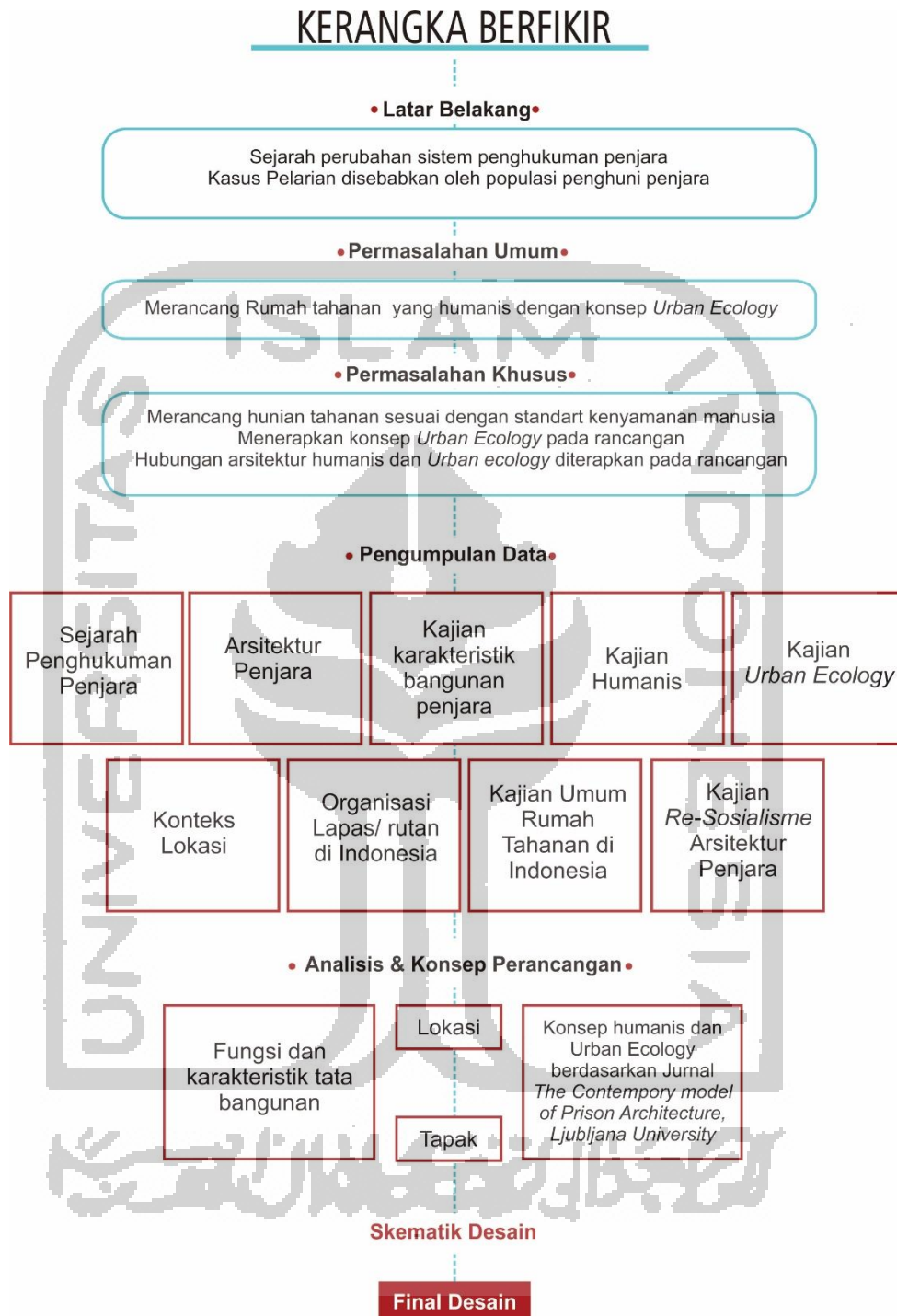
### 1.8.1 Peta Persoalan



**Gambar 1. 1** Peta Persoalan

*Sumber : Analisis Penulis*

## 1.8.2 Kerangka Berfikir



**Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir**

*Sumber: Analisis Penulis*

## 1.9 Keaslian Penulisan

Beberapa laporan penelitian yang memiliki fungsi bangunan dan pendekatan serupa telah dilakukan namun terdapat perbedaan yang menjadi keunikan laporan penelitian penulis. Beberapa laporan penelitian yang sudah ada dan ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. *Maximum Security Prison Design* Pendekatan pada Humanis desain dan Eko Arsitektur

Penulis : Risqi Azhar Al Habib

Tahun terbit : 2015, Universitas Muhamadiyah Surakarta

Skripsi tersebut menekankan pada perancangan Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Perbedaan dengan penulis adalah pada re-desain sebuah lokasi yang sudah ada yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

2. Redesain Lembaga Pemasyarakatan Di Manado *Panoptic Architecture*

Penulis : Fadillah Dwi Eldija

Tahun terbit : 2017, Universitas Sam Ratulangi Manado

Skripsi tersebut meredesain Lapas Manado menggunakan pendekatan panoptik dari Jeremy Bentham. Perbedaan dengan penulis adalah pendekatan yang digunakan serta lokasi. Penulis menggunakan pendekatan humanis agar meningkatkan kualitas kelayakan huni di dalam rumah tahanan.

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Klaten, Jawa Tengah

Penulis : Rahmat Yani Z.T

Tahun terbit : 2006, Universitas Islam Indonesia

Skripsi tersebut meredesain Lapas Kelas II A Klaten penekanan pada penataan massa, pengolahan Ruang Luar Dalam agar menunjang Sistem keamanan dan Pembinaan. Perbedaan dengan penulis terdapat pada pendekatannya.



### 1.10 Sistematika penulisan

Bagian Pertama : Pendahuluan

Bagian Kedua : Data dan Kajian Teori

Bagian Ketiga : Analisis, Konsep dan Skematik perancangan

Bagian Keempat : Hasil Perancangan

Bagian Kelima : Evaluasi dan Kesimpulan

